

PEMIDANAAN KASUS PERKAWINAN

Endang Hermansah dan Siti Zahrotul Jannah

Dosen UNUSIA Jakarta & Pegiat Gender Muslimat Jakarta Barat

Abstrak

Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak pidana kawin diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP itu hukuman semestinya dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama. Dengan studi kasus hukum tulisan ini bertujuan menganalisis aspek yuridis pemidanaan kasus perkawinan.

Kata Kunci: Pidana, Perkawinan

A. Pendahuluan

Seringkali suatu ajaran menimbulkan polemik, kontroversi, atau pro dan kontra bila ajaran tersebut dipraktikkan dalam kenyataan. Misalnya ajaran tentang dibolehkannya poligami. Bila seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu, maka laki-laki ini disebut telah melakukan poligami. Bila ajaran ini diterapkan maka munculah polemic dalam masyarakat. Polemic ini berakaitan dengan persoalan nasib perempuan yang dinikahi secara poligamis. Juga berkaitan dengan tafsir tentang makna keadilan yang harus diterapkan seorang laki-laki sebagai kewajiban kepada isteri-isterinya. Sebagian pihak menilai laki-laki tidak mungkin dapat berbuat adil kepada istri-istrinya karena, sebagai makhluk rasional yang juga mempunyai emosi kemungkinan besar laki-laki akan lebih mencintai satu istrinya dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Cinta yang lebih ini

boleh jadi akan membuat sang laki-laki lebih mendahulukan hak-hak isteri tercintanya ketimbang dengan isteri-isteri yang lainnya.

Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya.

Dalam islam, masalah poligami juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa perkara yang masuk dalam konteks "pertimbangan", hal ini terbukti dalam ayat-ayat ataupun suatu riwayat yang dijadikan dasar sumber hukum dalam perkara poligami sendiri juga terikat aturan- aturan, syarat-syarat serta ketentuan lain berupa yang kesanggupan, keadilan dan faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Di Indonesia sendiri juga terdapat kebijakan hukum yang mengatur masalah poligami diantaranya terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam Pasal 5 ayat [1] UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan):

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Di dalam point (a). adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri. Hal ini yang seringkali dilanggar oleh para laki-laki dimana segelintir orang justru memanipulasi data diri mereka dengan membuat identitas palsu dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang seharusnya berstatus bersuami dirubah menjadi lajang ataupun duda. Sehingga secara tidak langsung sudah melanggar ketentuan

yang berlaku. Karena persyaratan yang cukup sulit itulah banyak efek dari poligami yakni segelintir orang memilih untuk melakukan hal instan demi memenuhi keinginannya yakni dengan melakukan pernikahan siri.

Dewasa ini, statistik kejadian nikah siri meningkat seiring berlalunya waktu. Terutama pasca beredarnya berbagai pemberitaan di seluruh jenis media (audio, visual dan audiovisual) akan nikah siri mulai dari kalangan tokoh politik, selebritis maupun masyarakat biasa, meski perkawinan tersebut sah menurut agama namun belum tentu secara hukum. Namun segelintir orang dengan tingkat pemberitaan tinggi sehingga menyebabkan proses *conditioning* terjadi di masyarakat konsumen berita. Proses *conditioning* sendiri adalah proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat akan berbagai budaya baru yang terjadi namun akibat pemberitaan yang berulang-ulang budaya tersebut semakin cepat dapat diterima oleh masyarakat dan dijadikan bagian dari budaya masyarakat itu sendiri. Sebagai sebuah ajaran nikah siri ini bisa dipraktikan oleh siapapun yang hendak menikah. Ketika praktik dicermati, dilihat dan diteliti oleh sebagian pihak, ditemukanlah bentuk-bentuk penyimpangan dari praktik nikah siri ini, khususnya perempuan yang dinikahi secara siri. Lalu, disimpulkan bahwa praktik nikah siri merupakan praktik yang menyimpang dari ajaran islam, khususnya ajaran tentang hak-hak kaum perempuan di dalam islam. Setelah bukti dari hal ini jelas, mulailah dipikirkan bahwa nikah siri seharusnya ditiadakan saja dalam islam. Pelaku nikah siri seharusnya dihukum, dipidana atau didenda. Tujuan dari hukuman, pidana, atau denda ini tentu saja adalah agar mereka yang menikah sirri merasa jera atau kapok sebab telah melakukan pernikahan secara sirri. Tujuan yang lain adalah, agar laki-laki dan perempuan yang hendak menikah seharusnya tidak menikah secara sirri.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya perkawinan lebih dari satu orang diperbolehkan karena telah diatur dalam undang-undang. Namun pada kasus ini berbeda sebagaimana yang terjadi dalam Kasus Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Sel, dimana

Maryanah (terdakwa) telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 279 KUHP *yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Ke-2* barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan telah ada menjadi penghalang yang sah

Sebelum Terdakwa mengadakan perkawinan telah mengetahui bahwa calon suaminya Andi Bahrudin., S.H.,M.H telah memiliki isteri yakni saksi Hasriani dan masih terikat perkawinan dengan saksi Hasriani. Untuk melengkapi persyaratan dokumen pernikahan, Andi Bahrudin.,S.H.,M.H telah membuat surat pernyataan/surat keterangan tentang status perkawinan yang mencantumkan status pernikahannya seolah-olah belum menikah yang diketahui oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa I Nadi Bahrudin dan Terdakwa II Juwita R mengadakan perkawinan dan dilakukan tanpa seizin dari saksi Hasriani selaku isteri pertamanya.

Apabila melihat perkawinan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panakukang dan ia hanya membuat surat keterangan sudah nikah Nomor : 072/Imam Pem. PPN/KT/ III/2013, demi kepentingan untuk membuat akta anak, karena ketika Terdakwa I (Andi Bahrudin.,S.H.,M.H) menikahi Terdakwa II (Juwita R) sedang dalam keadaan Hamil.

Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan

perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai Pasal 279 dengan aturan undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut. Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHP hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkatnya dalam suatu judul makalah Yaitu: ***“Pemidanaan asal-usul perkawinan akibat nikah siri dan poligami tak berizin”***

Berdasarkan pada pemikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah : (1) Apa pendekatan Hukum pemidanaan kasus perkawinan? (2) Apa potensi kasus pidana dalam asal usul perkawinan?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah ini adalah: (1) Untuk mengetahui pendekatan hukum pemidanaan kasus perkawinan; (2) Untuk mengetahui potensi kasus pidana dalam asal-usul perkawinan

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Eksistensi dan Prospek Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *Yuridis*, penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk legislasi yaitu Kompilasi Hukum Islam, mengenai pencatatan perkawinan yang terdapat pada pasal 5. Sementara pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada hukum islam

1. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.

C. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya oleh pelaku.

Pengertian tindak pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, yang masing-masing memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal- pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan , dan denda.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Adami Chazawi, *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya suatu perbuatan pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana). Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:72-73) sebagai berikut:

1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
2. Moeljiatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy, Delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas

mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan pengertiannya, menurut **Simons** tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, pertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut **Andi Hamzah** dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Menurut **H.J van Schravendiik** mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nebetan atau metdoen, negatif/maupun akibatnya).

Dengan demikian lebih lanjut, **Kanter** dan **Sianturi** menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilarang

atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan yang ditimbulkan karena keduanya memunculkan unsur – unsur perbuatan pidana. Unsur formal meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak

patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsurunsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana :

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika

perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonensia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP). Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang

tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

1.3. Tindak Pidana Terhadap Perkawinan

Uraian diatas telah menjabarkan bagaimana suatu perkawinan dapat sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam pasal 279 ayat (1) KUHP;

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Dalam pasal tersebut pada butir ke (1) telah disebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Artinya seseorang tidak dapat melakukan pernikahan apabila telah melakukan perkawinan sebelumnya, sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri

lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh rajaraja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Selain itu pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU. No 1/1974 Tentang Perkawinan mewajibkan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan untuk membuat surat dari pengadilan tempat tinggalnya dengan seizin suami/istri dari perkawinan sebelumnya.

1.4. Tindak Pidana Terhadap Poligami

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman. Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi. Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara lakilaki dan perempuan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan bahwa Pada Asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami. Penyimpangan dari asas Monogami sering dikenal dengan istilah Poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Permasalahan akan timbul apabila Poligami dilakukan dengan tidak sesuai aturan yang berlaku. Walaupun Poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa Poligami dijadikan asas dalam undang-Undang nomdf 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain Poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan atas izin dari Pengadilan. Sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tindak pidana perkawinan poligami pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Ada 4 (empat) Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 280 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 279 KUHP dinyatakan bahwa:

- a. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :
- b. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- c. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- d. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4.

Pada KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubble huwalijke* atau bigami karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip monogamy maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) istri.

Seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini. Pasal 279 KUHP Ayat (1) No. 2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) istri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah istri tanpa batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang istri bersama partnernya, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan. Tentang hal ini ada dua pendapat:

- a. Menurut Simons-Pompe dan Noyon-Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum

karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum dibatalkan.

- b. Menurut Van Bemmelen, para pelaku tidak selalu dapat dihukum, tetapi ada kemungkinan bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian suatu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu.

Dihubungkan dengan Pasal 279 KUHPidana Tindak pidana perkawinan poligami dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang menyatakan:

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam

ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan- 31 perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan. Menurut Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijke) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang

bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen. Pendapat yang memberikan rumusan yang terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos, di dalam suatu strafbaarfeit (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal perbuatan atau tidak berbuat (een doen of een nalaten).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang dalam terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak penting dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materil,
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dalam kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa),
- d. Elemen melawan (wederechtheid),
- e. Dan sederetan elemen lain menurut rumusan Undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka hukum (in het openbaar) dan segi subjektif misalnya, Pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorbedachtheid).

Berdasarkan pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan di atas, maka khusus untuk tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 KUHPidana (1) adalah sebagai berikut : 1. Barang siapa 2. Yang kawin (mengadakan perkawinan) 3. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi

2. Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dalam islam perkawinan tidak hanya sekedar hubungan antara individu laki-laki dan individu perempuan yang akan menjadi suami-isteri tetapi melibatkan individu bahkan individu-individu lain yang dibingkai oleh rukun dan syarat perkawinan, apalagi bila dikaitkan dengan hukum-hukum perkawinan dan tujuannya menurut Islam. Dengan kata lain, perkawinan menurut Islam bernilai ibadah yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Dalam perkawinan juga tidak hanya muncul persoalan perdata saja, terkadang dalam perkawinan juga akan menimbulkan masalah yang menyangkut kepidanaan, seperti kalau misalnya seorang suami yang sudah beristri hendak menikah lagi, maka ia harus meminta ijin tertulis dari pengadilan setempat dan ijin dari istrinya, hal ini perlu diatur sebagaimana dalam Pasal 28D Pasal ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum ‘yang adil’ serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mengatur persoalan-persoalan pidana yang timbul dalam perkawinan, Sanksi pidana dalam hukum perkawinan adalah hukuman yang akan diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum perkawinan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 451 kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini 34 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.[1] Dalam penjelasan Pasal 45 di atas dikemukakan bahwa dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukum dan denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40, dan sanksi hukum kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 45 dan penjelasan dari peraturan pemerintah tersebut, membedakan jenis pelanggaran dan sanksi hukuman antara mempelai dengan pejabat pencatat perkawinan. Perbedaan itu adalah hukuman bagi mempelai yang melakukan pelanggaran hukuman atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan bagi pejabat pencatat nikah yang melakukan pelanggaran adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggitingginya Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2.1. Asal Usul Perkawinan

Terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Yang bisa dipakai untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 dan 280.

a. Pasal 277

- 1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dapat dinyatakan.

b. Pasal 279

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

c. Pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

2. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan

menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) adalah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang – Undang perkawinan sebagai berikut:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- a) Dalam undang – undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap – tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b) Undang – undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- c) Undang – undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- d) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang – undang ini 38 menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- e) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
- f) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “
- g) Apabila devinisi diatas kita telaah, maka terdapatlah Lima unsur didalamnya:
 - i. Ikatan lahir bathin.
 - ii. Antara seorang Pria seorang wanita.
 - iii. Sebagai suami-istri.
 - iv. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
 - v. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua belah pihak, namun perkawinan yang akan dilakukan dapat terjadi apabila memenuhi syarat – syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam UU

Perkawinan maupun syarat – syarat lainnya. Adapun syarat – syarat tersebut adalah:

Syarat – syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat – syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantar mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 48 mendengar orang – orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat 1 – ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

c. Nikah Siri

Kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari Bahasa Arab, yaitu “sirrun” juga berarti rahasia juga berarti sembunyi-sembunyi dan dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi / dirahasiakan yaitu dengan tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada dinas catatan sipil yang ada. Nikah siri bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 1 UU Pokok perkawinan No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan siri juga digolongkan menjadi dua : Pernikahan yang dilakukan tanpa wali (belum meninggal dunia) dan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhinya syarat-syarat lainnya tetapi tidak dicatat KUA setempat. Perbedaan Antara Pernikahan Siri dengan Pernikahan pada Umumnya Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu menyangkut pencatatan perkawinan kepada pencatat sipil. Hal lain selain

tentang pencatatan perkawinan yaitu menyangkut keabsahan perkawinan tersebut. Apabila dalam pernikahan siri keabsahannya hanya menyoal menyangkut agama saja (sah dimata agama) dan tidak sah dalam hukum positif Sedangkan perkawinan umum sah baik agama maupun hukum positif Indonesia. Tentang walimah juga menjadi pembeda dimana pernikahan umum adanya walimah untuk memberi tahukan berita bahagia kepada masyarakat. Sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.

C. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana asalusul perkawinan.

Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No. 1416/PID.B/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa I bernama ANDI BAHARUDDIN, SH,MH. Lahir di Bone pada tanggal 4 April 1961 saat berstatus terdakwa berusia 53 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Tinggal di jalan borong raya perumahan graha janna blok c no.29 Makassar. Beragama Islam. Bekerja sebagai anggota POLRI. Terdakwa II bernama JUWITA R. alias Ita, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 1 juli 1985 saat berstatus terdakwa berusia 29 tahun, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, tinggal di jalan

pettarani II Q no.17 Makassar, beragama Islam, bekerja sebagai honorer perawat.

2. Posisi Kasus

Bahwa mereka terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH,MH dan terdakwa JUWITA R alias Ita, pada hari Senin tanggal 22 februari 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan ialah telah menjadi penghalang yang sah untuk itu. Berawal terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH,MH menikah kedua kalinya dengan terdakwa JUWITA R alias ITA di rumah RUSDI (orang tua Juwita) di Jl. Pettarani II Q No. 17 Makassar tanpa sepengetahuan dari saksi korban HASRIANI baik secara lisan maupun tertulis dan telah diterbitkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 072/Imam Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 maret 2013, sedangkan ANDI BAHARUDDIN, SH,MH masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban HASRIANI berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 36/VII/1984 tanggal 8 juli 1984 dan dari hasil perkawian tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masingmasing ANDI HARYUNI, ANDI FAJARWATI, ANDI DINA HERANI dan ANDI CAKRA WIRAPERDANA. Terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH,MH melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA karena JUWITA R telah hamil sebelum menikah dimana terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH,MH berpacaran dengan terdakwa JUWITA R alias ITA selama 2(dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Makassar dan mereka telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM BAHARUDDIN.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus Tindak Pidana terhadap Asal-Usul Perkawinan dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut: Bahwa mereka terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., MH dan terdakwa JUWITA R alias ITA pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, seorang laki-laki yang beristri, perempuan yang bersuami, laki-laki yang belum beristri, tetapi melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bersuami, perempuan yang belum bersuami, tetapi melakukannya dengan laki-laki yang telah beristri, berbuat zina dilakukan suka sama suka. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., MH menikah 61 yang kedua kalinya dengan terdakwa JUWITA R alias ITA karena JUWITA R alias ITA telah hamil sebelum menikah dimana terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., MH berpacaran dengan terdakwa JUWITA R alias ITA selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM BAHARRUDIN. **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.**

- b) Bahwa terdakwa JUWITA R alias ITA dengan ANDI BAHARUDDIN, SH., MH karena terdakwa JUWITA R alias ITA telah hamil sebelum menikah dimana ANDI BAHARUDDIN, SH., MH berpacaran dengan terdakwa JUWITA R alias ITA selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM BAHARRUDIN. **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.**
- c) Bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., MH menikah yang kedua kalinya dengan terdakwa JUWITA R alias ITA karena JUWITA R alias ITA telah hamil sebelum menikah 62 dimana terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., MH berpacaran dengan terdakwa JUWITA R alias ITA selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM BAHARRUDIN. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa **1. ANDI BAHARUDDIN, SH.,** • **MH dan terdakwa 2 JUWITA R. alias ITA** terbukti bersalah

melakukan tindak pidana ” melangsungkan perkawinan tanpa izin” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. ANDI BAHARUDDIN, SH, MH dan terdakwa 2 JUWITA R. 63 alias ITA** dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Berdasarkan posisi kasus dalam perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.MKS, Penerapan dakwaan pasal 279 (1) Ke-1 KUHP yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan posisi kasus Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 279 (1) ke-1 KUHP, Maka Usur-Unsur dari pasal 279 (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- a) “Barangsiapa” Yang dimaksud adalah pribadi orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana
- b) “Mengadakan Perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui proses tata cara atau prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum

maupun kebiasaan masyarakat. Sepasang calon mempelai tidak akan dapat dikatakan mengadakan perkawinan apabila hanya berdua saja dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah

- c) “Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain” (angka 2) Unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa suami/istrinya telah memiliki istri/suami yang masih terikat di dalam perkawinan.
- d) “Adanya Penghalang yang sah” Unsur ini Bermakna bahwa kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur-unsur pada poin ke2 dan ke3. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah didalam perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi.

D. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kejahatan asal usul dan perkawinan No.1416/PID.B/2014/PN Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim, terdakwa yang telah melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama dakwaan yang dihadapkan pada terdakwa khususnya yang menyatakan

terdakwa dianggap melanggar ketentuan pasal 279 ayat (1) KUHP perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam Bab XIII yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kedudukan warga, sehingga terhadap kejahatan tersebut bukan merupakan delik aduan absolut sehingga tidak tunduk pada ketentuan pasal 74 KUHP oleh karena itu pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur-unsur 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.279 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan maksud penahanan yang merupakan suatu upaya untuk menjamin agar mudahnya proses persidangan dan agar terdakwa tidak melarikan diri serta mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap hal yang seperti itu tidak ada pada diri para Terdakwa maka tidak cukup alasan untuk menahan para terdakwa oleh karena itu kepada para terdakwa dinyatakan tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa I adalah seorang Perwira yang Perbuatan seharusnya menjadi panutan akan tetapi dalam hal ini tidak pantas;

Terdakwa II perbuatannya dapat membuat menciderai perasaan kaum isteri; Keadaan yang meringankan:

Terdakwa I dan II menyesali perbuatannya;

Terdakwa I dan II belum pernah dihukum;

2. **Amar Putusan**

Adapun amar putusan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. ANDI BAHARUDDIN,SH.MH. dan terdakwa II. JUWITA R alias ITA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDI• BAHARUDDIN,SH.MH dan terdakwa II. JUWITA R alias ITA oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan akepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp,5000,- (lima ribu rupiah)

3. **Analisis Penulis**

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternative yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP

Kedua: Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Ketiga: Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menurut penulis, penerapan hukum materiil didalam kasus ini sudah tepat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. Kemudian, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat di hukum adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

2. Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi;

Pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, dapat berupa “individu” (naturelijk person”) atau badan hukum (Rechtspersoon”). Andi Baharuddin dan Juwita R atau terdakwa telah memenuhi unsure barang siapa.

Pengertian yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Andi Baharuddin S.H.,M.H.

adalah anggota Polri aktif yang sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Hasriani. Bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam. Andi Baharuddin, S.H., M.H. telah dinikahkan untuk kedua kalinya oleh orang tua terdakwa Juwita R alias Ita tanpa dicatat dalam buku nikah yang dalam adat perkawinan tersebut dikenal dengan istilah kawin siri, dan sekarang sudah serumah dengan terdakwa Juwita R alias Ita, dan ternyata hubungan terdakwa Andi Baharuddin S.H.,M.H. dengan terdakwa Juwita R alias Ita itu telah melahirkan anak, hasil perkawinan siri dengan terdakwa Andi Baharuddin S.H.,M.H. , sedangkan Hasriani sebagai istri sahnyanya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Andi Baharuddin, S.H., M.H. sebagai suaminya untuk kawin lagi.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsure dan syarat pidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya. diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak pidana kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan No. 1416/Pid.B/2014/PN.MKS telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan halhal yang meringankan dan memberatkan bagi para terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan sudah tepat, meski jauh dari tujuan pembedaan yaitu menimbulkan rasa takut dan memberikan efek jera bagi pelakunya sendiri apalagi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong kejahatan yang sering didapati terjadi di ruang lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada
- Erwin dan Rudy. 1979. *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru
- Sahrani. Sohari. 2011. *Fiqh Keluarga (Menuju Perkawinan Secara Islami)*. Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- Taufiqurrahman. 2010. *Jangan Sirrikan Nikahmu*. Jakarta : Himmah Media
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Isla*. Jakarta : Gaya Media Pratama